

Integrasi Manajemen Usaha dan Mitigasi Risiko Banjir dalam Penguatan Ketahanan UMKM di Aceh Utara

Azhar^{✉1}, T. Edyansyah², Wahyuddin³, Hilmi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Bukit Indah, 24352, Lhokseumawe, Indonesia

✉Corresponding Author: azhar@unimal.ac.id

Abstrak

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di wilayah Aceh Utara, banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas manajerial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir sebagai strategi penguatan ketahanan UMKM di Aceh Utara. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang meliputi identifikasi dan pemetaan masalah, analisis kebutuhan, pelaksanaan pendampingan manajemen usaha dan keuangan, integrasi mitigasi risiko dalam operasional usaha, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM, ditandai dengan kemampuan menyusun perencanaan usaha berbasis risiko banjir, perbaikan praktik pengelolaan keuangan usaha, serta penerapan langkah mitigasi risiko dalam operasional sehari-hari. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir pelaku UMKM dari pendekatan reaktif menuju pendekatan adaptif dalam menghadapi banjir. Kegiatan ini berkontribusi dalam mempercepat pemulihan usaha pasca banjir dan membangun fondasi ketahanan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

Kata Kunci: UMKM, Manajemen Usaha, Mitigasi Risiko Banjir, Ketahanan Ekonomi, Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan peningkatan intensitas serta luasan dampak dalam beberapa tahun terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa banjir mendominasi kejadian bencana tahunan di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah, terutama pada wilayah dengan sistem drainase dan tata guna lahan yang belum optimal (BNPB, 2022; BNPB, 2023; BNPB, 2024). Dalam konteks pembangunan wilayah, banjir tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Zein et al., 2025; Rusdanisari & Herwangi, 2025; Taslim & Akbar, 2019).

Dampak ekonomi akibat banjir bersifat multidimensional dan berjangka menengah hingga panjang (Iskandar, 2024; Yudianto, 2020; Sasti & Putra, 2025). World Bank menegaskan bahwa bencana banjir menyebabkan gangguan produksi, distribusi, dan konsumsi, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan rumah tangga dan memperlambat pemulihan ekonomi lokal (W. Bank, 2021). Ketika banjir terjadi secara berulang, kerugian ekonomi tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi faktor struktural yang melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pada wilayah yang bergantung pada sektor informal dan usaha skala kecil.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak tersebut. Secara struktural, UMKM di Indonesia umumnya memiliki keterbatasan modal, manajemen usaha yang sederhana, serta ketergantungan tinggi pada aktivitas operasional harian (Budiarto et al., 2018; Ningsih et al., 2025). Studi A. D. Bank, (2022) menunjukkan bahwa UMKM memiliki kapasitas adaptasi yang rendah terhadap gangguan eksternal, termasuk bencana alam, karena minimnya perencanaan risiko, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya akses terhadap instrumen mitigasi usaha. Ketika banjir terjadi, gangguan kecil pada proses produksi atau distribusi dapat langsung menghentikan keseluruhan aktivitas usaha.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi di wilayah Aceh Utara yang secara geografis memiliki sejumlah kawasan rawan banjir akibat karakteristik daerah aliran sungai dan pola curah hujan musiman. Data Badan Pusat Statistik dan laporan kebencanaan daerah menunjukkan bahwa banjir di Aceh Utara secara berulang berdampak pada permukiman, fasilitas ekonomi, serta aktivitas usaha masyarakat, termasuk perdagangan, usaha kuliner, jasa skala mikro, dan usaha rumah tangga produktif (BPS, 2023; BPBD, 2024). Kerusakan peralatan usaha, hilangnya bahan baku, serta terhentinya operasional dalam periode tertentu menjadi permasalahan yang umum dialami pelaku UMKM pasca banjir (Lestari, 2022).

Permasalahan ekonomi tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas manajerial pelaku UMKM dalam mengelola risiko bencana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di daerah rawan bencana belum memasukkan aspek risiko lingkungan ke dalam perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan (Wajdi et al., 2012);

(Ramada, 2024). Pengelolaan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga, pencatatan transaksi belum tertata, dan keputusan usaha cenderung bersifat reaktif. Akibatnya, setiap kejadian banjir kembali menempatkan UMKM pada tingkat kerentanan yang sama dan memperpanjang proses pemulihan ekonomi lokal.

Dari perspektif ekonomi dan manajemen, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan usaha yang berjalan dengan kebutuhan penguatan ketahanan usaha di wilayah rawan bencana. Penanganan banjir selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek tanggap darurat dan bantuan pasca bencana, sementara penguatan kapasitas manajerial dan ketahanan usaha belum menjadi prioritas utama (UNDP, 2022). Padahal, berbagai studi menegaskan bahwa integrasi mitigasi risiko bencana ke dalam manajemen usaha merupakan kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi kerugian berulang akibat bencana (Hallegatte et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada integrasi manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir sebagai strategi penguatan ketahanan UMKM di Aceh Utara. Pengabdian ini memandang mitigasi bencana sebagai bagian dari praktik manajemen usaha yang perlu dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. Melalui pendampingan yang terstruktur dan kontekstual, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta adaptasi operasional sehingga lebih siap menghadapi banjir yang berulang dan mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya secara berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai intervensi penguatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM terdampak banjir melalui pendekatan manajemen usaha yang terintegrasi dengan mitigasi risiko bencana. Metode pelaksanaan disusun secara bertahap, sistematis, dan kontekstual dengan karakteristik wilayah rawan banjir di Aceh Utara, serta mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal, manajemen, dan akses informasi.

Pendekatan dan Sasaran Kegiatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendampingan partisipatif berbasis masalah. Pendekatan ini menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama kegiatan, bukan sekadar penerima materi. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan UMKM terdampak banjir yang bergerak pada sektor perdagangan eceran, usaha kuliner, jasa skala mikro, dan usaha rumah tangga produktif yang mengalami gangguan operasional, kerusakan aset, atau penurunan pendapatan akibat banjir.

Tahap Identifikasi dan Pemetaan Masalah

Tahap awal pelaksanaan difokuskan pada identifikasi dampak banjir terhadap aktivitas usaha UMKM. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan pada lokasi usaha terdampak, wawancara terstruktur dengan pelaku UMKM, serta diskusi kelompok untuk menggali pengalaman usaha sebelum dan sesudah banjir. Identifikasi meliputi jenis kerugian usaha, pola gangguan operasional, strategi bertahan yang selama ini dilakukan, serta tingkat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi banjir berulang. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai permasalahan ekonomi dan manajerial yang dihadapi UMKM.



Gambar 1. Diskusi awal bersama tim pengabdian pasca observasi lapangan pada lokasi usaha terdampak

Diskusi awal yang dilakukan bersama tim pengabdian setelah observasi lapangan memperlihatkan secara jelas kompleksitas permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM terdampak banjir. Melalui pertukaran pandangan antaranggota tim, diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai keterkaitan antara dampak fisik banjir, gangguan operasional usaha, dan keterbatasan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Hasil diskusi menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi yang dialami pelaku usaha tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan antara aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan kesiapan menghadapi risiko banjir yang berulang.

Diskusi ini juga menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pendampingan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran. Temuan lapangan yang dibahas bersama tim mengonfirmasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih bersifat reaktif dalam menghadapi banjir dan belum memiliki strategi usaha yang adaptif. Oleh karena itu, hasil diskusi pasca observasi digunakan sebagai pijakan untuk menyusun program pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan pasca banjir, tetapi juga pada penguatan ketahanan usaha melalui integrasi manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir secara berkelanjutan.

Tahap Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pendampingan

Data hasil identifikasi dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kesenjangan antara praktik pengelolaan usaha yang berjalan dengan kebutuhan penguatan ketahanan usaha berbasis risiko banjir. Berdasarkan analisis tersebut, tim menyusun rencana pendampingan yang mencakup penguatan manajemen usaha, pengelolaan keuangan sederhana, dan integrasi mitigasi risiko banjir dalam operasional UMKM. Perencanaan disesuaikan dengan tingkat literasi usaha peserta agar materi dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.

Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kombinasi pelatihan, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Pendampingan manajemen usaha diarahkan pada penyusunan perencanaan usaha sederhana yang mempertimbangkan risiko banjir, termasuk penataan proses produksi, pengelolaan stok, dan penyesuaian jam operasional. Pendampingan manajemen keuangan difokuskan pada pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, pencatatan transaksi sederhana, serta perencanaan keuangan darurat pasca banjir. Integrasi mitigasi risiko dilakukan melalui pengenalan langkah adaptasi usaha, seperti perlindungan aset usaha, pengaturan lokasi penyimpanan bahan baku, dan strategi keberlanjutan usaha saat terjadi gangguan operasional.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap selama proses pendampingan. Evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman dan praktik pelaku UMKM dalam mengelola usaha berbasis risiko banjir. Indikator evaluasi meliputi kemampuan pelaku usaha menyusun rencana usaha adaptif, kerapian pengelolaan keuangan, serta kesiapan menghadapi potensi banjir di masa mendatang. Diskusi reflektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala implementasi dan merumuskan perbaikan lanjutan.

Tahap Tindak Lanjut

Tahap akhir pelaksanaan adalah penyusunan rekomendasi tindak lanjut berbasis hasil evaluasi. Rekomendasi diarahkan pada penguatan keberlanjutan usaha UMKM dan pengembangan kapasitas manajerial secara berkelanjutan. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lokal dalam merancang program penguatan ekonomi pasca banjir yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada ketahanan usaha.

Metode pelaksanaan ini dirancang agar selaras dengan tujuan pengabdian, menjawab permasalahan yang diidentifikasi pada pendahuluan, serta menghasilkan dampak nyata bagi penguatan ekonomi UMKM terdampak banjir di Aceh Utara.

Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan struktural dan manajerial yang dihadapi pelaku UMKM terdampak banjir di Aceh Utara. Solusi disusun secara terintegrasi dengan menempatkan mitigasi risiko banjir sebagai bagian dari praktik manajemen usaha, bukan sebagai aktivitas terpisah yang bersifat insidental.

Penguatan Perencanaan Usaha Berbasis Risiko Banjir

Solusi pertama difokuskan pada penguatan perencanaan usaha yang mempertimbangkan risiko banjir sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan usaha. Pelaku UMKM didampingi untuk menyusun perencanaan usaha sederhana yang mencakup identifikasi risiko banjir, potensi dampaknya terhadap aktivitas produksi dan distribusi, serta langkah adaptasi yang dapat dilakukan. Perencanaan ini bertujuan agar pelaku usaha mampu mengantisipasi gangguan usaha dan tidak hanya bersikap reaktif ketika banjir terjadi.

Penguatan Manajemen Keuangan Usaha Pasca Banjir

Solusi kedua diarahkan pada perbaikan manajemen keuangan UMKM agar lebih siap menghadapi kondisi darurat akibat banjir. Pelaku usaha didampingi untuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, melakukan pencatatan transaksi sederhana, serta menyusun perencanaan keuangan darurat. Penguatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM menjaga arus kas usaha, mengendalikan kerugian, dan mempercepat pemulihan usaha pasca banjir.

Integrasi Mitigasi Risiko dalam Operasional Usaha

Solusi ketiga menekankan integrasi mitigasi risiko banjir ke dalam operasional usaha sehari-hari. Pelaku UMKM diperkenalkan pada strategi adaptasi operasional, seperti pengaturan lokasi penyimpanan bahan baku dan peralatan usaha agar lebih aman dari genangan, penyesuaian proses produksi, serta pengelolaan stok yang lebih fleksibel. Integrasi ini bertujuan mengurangi potensi kerugian fisik dan mempercepat keberlanjutan operasional ketika banjir terjadi.

Penguatan Kapasitas Manajerial dan Pola Pikir Adaptif

Solusi keempat diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial dan perubahan pola pikir pelaku UMKM. Pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman bahwa risiko banjir merupakan bagian dari lingkungan usaha yang perlu dikelola secara sistematis. Dengan pola pikir adaptif, pelaku UMKM diharapkan mampu mengambil keputusan usaha yang lebih rasional, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Lokal

Solusi kelima adalah penguatan jejaring usaha dan kolaborasi lokal sebagai strategi penguatan ketahanan UMKM. Pelaku UMKM didorong untuk membangun kerja sama dengan pelaku usaha lain, komunitas usaha, dan pemangku kepentingan lokal guna saling berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan pasca banjir. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat posisi tawar UMKM di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, solusi yang ditawarkan bertujuan membangun fondasi ketahanan UMKM yang lebih kuat melalui integrasi manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir. Dengan penerapan solusi ini, pelaku UMKM di Aceh Utara diharapkan mampu mengurangi kerugian akibat banjir, mempercepat pemulihan usaha, serta menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah rawan bencana.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung dalam konteks pasca banjir yang masih menyisakan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pelaku UMKM. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar pelaku usaha berada dalam kondisi pemulihan yang belum stabil, ditandai dengan terbatasnya modal kerja, menurunnya volume produksi, serta ketidakpastian dalam melanjutkan aktivitas usaha. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir tidak berhenti pada fase kejadian, tetapi berlanjut pada fase pemulihan yang sering kali luput dari intervensi penguatan kapasitas ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi pelaku UMKM untuk mengevaluasi praktik usaha yang selama ini dijalankan. Proses pendampingan membuka ruang dialog antara tim pengabdian dan pelaku usaha mengenai pengalaman menghadapi banjir, pola kerugian yang berulang, serta keterbatasan strategi yang dimiliki untuk bertahan. Diskusi ini mengungkap bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum pernah secara sistematis mengaitkan pengalaman banjir dengan perencanaan dan pengelolaan usaha.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang terdampak

Pelaksanaan pendampingan di wilayah Aceh Utara juga memperlihatkan keragaman tingkat kesiapan dan kapasitas pelaku UMKM. Perbedaan jenis usaha, skala modal, serta pengalaman menghadapi banjir memengaruhi respons dan kemampuan adaptasi masing-masing pelaku usaha. Oleh karena itu, hasil pengabdian tidak bersifat seragam, tetapi menunjukkan spektrum perubahan yang dipengaruhi oleh konteks usaha dan kondisi sosial ekonomi pelaku UMKM. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan pendampingan yang fleksibel dan kontekstual dalam kegiatan pengabdian berbasis kebencanaan.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas manajerial UMKM pasca banjir tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan pola pikir dan cara pandang pelaku usaha terhadap risiko. Sebelum pendampingan, banjir diposisikan sebagai peristiwa eksternal yang sepenuhnya berada di luar kontrol usaha. Setelah kegiatan berlangsung, pelaku UMKM mulai memandang risiko banjir sebagai faktor lingkungan yang perlu dikelola melalui keputusan usaha yang lebih terencana. Perubahan cara pandang ini menjadi fondasi penting bagi munculnya praktik manajemen usaha yang lebih adaptif dan berorientasi pada ketahanan jangka menengah.

Perubahan Kapasitas Perencanaan Usaha Berbasis Risiko

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki perencanaan usaha yang mempertimbangkan risiko banjir. Pengambilan keputusan usaha bersifat jangka pendek dan berorientasi pada keberlangsungan harian tanpa antisipasi gangguan akibat bencana. Ketika banjir terjadi, usaha cenderung berhenti total dan pemulihan berlangsung lambat karena tidak adanya rencana adaptasi yang jelas.

Setelah pendampingan, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya perencanaan usaha berbasis risiko. Pelaku usaha mulai mampu mengidentifikasi titik rawan dalam aktivitas usahanya, memahami potensi dampak banjir terhadap produksi dan distribusi, serta menyusun langkah adaptasi yang realistis. Perubahan ini menandai pergeseran dari pola pengelolaan usaha yang reaktif menuju pendekatan yang lebih antisipatif dan terencana.

Perbaikan Praktik Manajemen Keuangan Usaha

Pada kondisi awal, pengelolaan keuangan UMKM masih bercampur dengan keuangan rumah tangga, pencatatan transaksi belum tertata, dan tidak terdapat perencanaan keuangan khusus untuk menghadapi kondisi darurat pasca banjir. Situasi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan menghitung kerugian, mengelola arus kas, dan menentukan langkah pemulihan usaha secara tepat.

Pasca pendampingan, terjadi perbaikan signifikan pada praktik manajemen keuangan. Pelaku UMKM mulai memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib, serta memahami pentingnya perencanaan keuangan darurat. Perbaikan ini meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengendalikan keuangan, mengurangi tekanan ekonomi pasca banjir, dan mempercepat proses pemulihan usaha.

Integrasi Mitigasi Risiko dalam Operasional Usaha

Sebelum kegiatan, mitigasi risiko banjir belum menjadi bagian dari operasional usaha sehari-hari. Pelaku UMKM cenderung menempatkan peralatan dan bahan baku tanpa mempertimbangkan potensi genangan, serta tidak memiliki strategi operasional ketika banjir terjadi. Akibatnya, kerugian fisik usaha sering kali berulang pada setiap kejadian banjir.

Setelah pendampingan, pelaku UMKM mulai mengintegrasikan langkah mitigasi risiko ke dalam operasional usahanya. Penataan ulang lokasi penyimpanan, perlindungan peralatan usaha, serta pengelolaan stok yang lebih fleksibel mulai diterapkan sesuai kapasitas masing-masing usaha. Integrasi ini terbukti mampu mengurangi potensi kerugian fisik dan memungkinkan usaha kembali beroperasi lebih cepat setelah banjir surut.

Perubahan Pola Pikir dan Penguatan Ketahanan Usaha

Salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian ini adalah perubahan pola pikir pelaku UMKM terhadap risiko banjir. Sebelum pendampingan, banjir dipandang sebagai peristiwa eksternal yang sepenuhnya berada di luar kendali pelaku usaha. Setelah kegiatan, pelaku UMKM mulai memahami bahwa meskipun banjir tidak dapat dihindari, dampak ekonominya dapat dikelola melalui praktik manajemen usaha yang lebih adaptif.

Perubahan pola pikir ini memperkuat ketahanan usaha karena pelaku UMKM menjadi lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian. Pelaku usaha menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan usaha pasca banjir dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan darurat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya.

Implikasi terhadap Penguatan Ekonomi Lokal

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa integrasi manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi lokal. Perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan terlihat jelas pada peningkatan kapasitas manajerial, kesiapan usaha menghadapi bencana, serta kecepatan pemulihan ekonomi pelaku UMKM. Kegiatan ini tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan pasca banjir, tetapi juga membangun fondasi ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam jangka menengah.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan UMKM di wilayah rawan banjir tidak cukup dilakukan melalui bantuan pasca bencana semata. Pendampingan yang terintegrasi antara aspek manajemen usaha dan mitigasi risiko merupakan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kerugian berulang dan menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di Aceh Utara.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Aceh Utara berhasil menunjukkan bahwa integrasi manajemen usaha dan mitigasi risiko banjir merupakan pendekatan yang efektif dalam memperkuat ketahanan UMKM di wilayah rawan bencana. Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual mampu meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM, khususnya dalam perencanaan usaha berbasis risiko, pengelolaan keuangan usaha, dan adaptasi operasional menghadapi banjir yang berulang.

Hasil kegiatan menunjukkan perbedaan yang jelas antara kondisi sebelum dan sesudah pendampingan. Sebelum kegiatan, pelaku UMKM cenderung bersikap reaktif terhadap banjir, tidak memiliki perencanaan usaha yang mempertimbangkan risiko bencana, serta belum menerapkan pengelolaan keuangan yang tertata. Setelah pendampingan, pelaku UMKM mulai mampu mengantisipasi risiko banjir, menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik, dan mengintegrasikan langkah mitigasi risiko dalam operasional usahanya. Perubahan pola pikir ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan usaha dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menegaskan bahwa penguatan UMKM di daerah rawan banjir tidak cukup dilakukan melalui bantuan pasca bencana semata. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek manajemen usaha dan mitigasi risiko bencana diperlukan untuk mengurangi kerugian ekonomi berulang dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program pengabdian dan kebijakan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah rawan banjir, khususnya di Aceh Utara.

Referensi

- Bank, A. D. (2022). Asian development outlook 2022: Mobilizing taxes for development. *Asian Development Bank*.
Bank, W. (2021). The changing nature of risks and opportunities for small and medium enterprises. *World Bank Group*.
BNPB. (2022). Kajian Risiko Bencana Indonesia. *BNPB*.
BNPB. (2023). Laporan kejadian bencana banjir di Indonesia tahun 2023. *BNPB*.
BNPB. (2024). Laporan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh Tahun 2022–2024. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*.

- BPBD. (2024). Laporan kejadian dan dampak banjir Kabupaten Aceh Utara. *BPBD Aceh Utara*.
- BPS. (2023). Kabupaten Aceh Utara dalam angka 2023. *BPS Kabupaten Aceh Utara*.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Hallegatte, S., Rentschler, J., & Rozenberg, J. (2020). *Adaptation principles*.
- Iskandar, A. (2024). Analisis Dampak Bencana Banjir Terhadap Eksistensi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1).
- Lestari, T. (2022). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery Dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ningsih, N. H. I., Wirastomo, H., Asidah, E., Budiman, S. B., Andika, H. S., & Amin, F. S. (2025). Analisis Manajemen Keuangan UMKM Kuliner di Pantai Tanjung Bias (Financial Management Analysis of Culinary MSMEs on Tanjung Bias Beach). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 32(1).
- Ramada, A. (2024). Meningkatkan ketahanan UMKM terhadap bencana di Indonesia. *Journal of Entrepreneurial Economic*, 1(1), 30–38.
- Rusdanisari, A., & Herwangi, Y. (2025). Bentuk adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir di kawasan permukiman tepian sungai Kelurahan Pahandut Seberang. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 9(1), 108–117.
- Sasti, E. A., & Putra, A. K. (2025). *Pendidikan Bencana Banjir Dalam Perspektif Geografi*.
- Taslim, I., & Akbar, M. F. (2019). Koordinasi publik untuk pengurangan risiko bencana (PRB) banjir pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan gorontalo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(2), 63–78.
- UNDP. (2022). Disaster risk reduction and recovery: Building resilience for sustainable development. *United Nations Development Programme*.
- Wajdi, M. F., Setyawan, A. A., Syamsudin, S., & Isa, M. (2012). Manajemen Risiko Bisnis Umkm Di Kota Surakarta. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 106–126.
- Yudianto, A. (2020). *Analisis kelayakan ekonomi penanganan banjir sungai bringin kota semarang*.
- Zein, A. W., Sari, D., Parinduri, A. R., Ningsih, I. W. I., & Nasution, A. H. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Eskalasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir di Sumatra. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 834–841.